



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 77 TAHUN  
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) dinyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa pengurangan pendapatan di Dana Perimbangan, penggeseran Belanja Tidak Terduga, perubahan uraian dalam sub rincian obyek belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan antar rincian obyek belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyesuaian anggaran sesuai refocusing masing masing OPD untuk pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Pandemi Covid-19, pencantuman anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan, Sub Unit RSUD Wates dan Sub Unit RSUD Nyi Ageng Serang, penyesuaian rekening belanja premi BPJS Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan perubahan nama kegiatan dan rincian anggaran menyesuaikan pemetaan Kegiatan DAK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK'07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.578.872.013.759,00 berkurang sebesar Rp.22.044.177.000,00 menjadi Rp.1.556.827.836.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan:

a. Semula	Rp.	1.561.077.793.439,00	
b. Berkurang	Rp.	22.044.177.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		<u>1.539.033.616.439,00</u>

2 Belanja

a. Semula	Rp.	1.543.635.179.323,00	
b. Berkurang	Rp.	22.044.177.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		<u>1.521.591.002.323,00</u>
Surplus	Rp.		<u>17.442.614.116,00</u>

3	Pembiayaan :	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 17.794.220.320,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 17.794.220.320,00
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 35.236.834.436,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 35.236.834.436,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp. (17.442.614.116,00)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
	1. Semula	Rp. 235.572.599.824,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 235.572.599.824,00
b.	Pendapatan Transfer	
	1. Semula	Rp. 1.279.865.293.615,00
	2. Berkurang	Rp. 22.044.177.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 1.257.821.116.615,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
	1. Semula	Rp. 45.639.900.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 45.639.900.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Pajak Daerah	
	1. Semula	Rp. 73.996.040.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 73.996.040.000,00
b.	Hasil Retribusi Daerah	
	1. Semula	Rp. 9.926.311.279,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 9.926.311.279,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	11.641.998.426,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		11.641.998.426,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	140.008.250.119,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		140.008.250.119,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1. Semula	Rp.	1.158.229.808.000,00	
2. Berkurang	Rp.	22.044.177.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.		1.136.185.631.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1. Semula	Rp.	121.635.485.615,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp.		121.635.485.615,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	7.190.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		7.190.000.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			
1. Semula	Rp.	38.449.900.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.		38.449.900.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi			
1. Semula	Rp.	1.136.612.773.074,00	
2. Bertambah	Rp.	16.223.012.672,00	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.		1.152.835.785.746,00
b. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	221.963.290.033,00	
2. Berkurang	Rp.	36.050.378.672,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		185.912.911.361,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	7.984.217.288,00	
2. Berkurang	Rp.	190.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		7.794.217.288,00
d. Belanja Transfer			
1. Semula	Rp.	177.074.898.928,00	
2. Berkurang	Rp.	2.026.811.000,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.		175.048.087.928,00

(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp.	676.146.134.808,00	
2. Bertambah	Rp.	10.852.297.825,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		686.998.432.633,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	387.529.571.902,00	
2. Bertambah	Rp.	8.462.698.747,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		395.992.270.649,00
c. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	56.926.866.364,00	
2. Berkurang	Rp.	3.041.983.900,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		53.884.882.464,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	16.010.200.000,00	
2. Berkurang	Rp.	50.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		15.960.200.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp.	3.007.400.000,00	
2. Berkurang	Rp.	2.575.850.300,00	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.		431.549.700,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1. Semula	Rp.	42.158.148.621,00	
2. Bertambah	Rp.	4.271.022.533,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.		46.429.171.154,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1. Semula	Rp.	73.097.643.535,00	
2. Berkurang	Rp.	24.440.406.916,00	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.		48.657.236.619,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1. Semula	Rp.	98.429.786.530,00	
2. Berkurang	Rp.	12.597.711.989,00	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp.		85.832.074.541,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1. Semula	Rp.	5.270.311.347,00	
2. Berkurang	Rp.	707.432.000,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.		4.562.879.347,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	7.984.217.288,00	
2. Berkurang	Rp.	190.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		7.794.217.288,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	8.392.235.128,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		8.392.235.128,00



b. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	168.682.663.800,00	
2. Berkurang	Rp.	2.026.811.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		166.655.852.800,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	17.794.220.320,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		17.794.220.320,00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	35.236.834.436,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		35.236.834.436,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya:			
1. Semula	Rp.	17.794.220.320,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		17.794.220.320,00
b. Pencairan Dana Cadangan:			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah:			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			Rp. 0,00
	setelah perubahan			
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai			Rp. 0,00
	ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan Dana Cadangan:			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah			Rp. 0,00
	perubahan			
b.	Penyertaan Modal Daerah:			
	1. Semula	Rp.	35.236.834.436,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan			Rp. 35.236.834.436,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh			Rp. 0,00
	tempo setelah perubahan			
d.	Pemberian Pinjaman Daerah:			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai			Rp. 0,00
	ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan:			

Pasal 5

Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Maret 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 31 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 16

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIBN19720822 199503 1 003